

Penataan PKL, Pemkot Bandung Prioritaskan di Beberapa Wilayah

BANDUNG (IM)- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus berupaya memaksimalkan penataan pedagang kaki lima (PKL). Saat ini kawasan yang jadi prioritas antara lain Basemen Alun-alun, Tegalega, dan juga kawasan Gelap Nyawang.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM (Diskop UKM) Kota Bandung Atet Dedi Handiman menyebut, penataan di ketiga wilayah tadi masih terus berlanjut.

Adapun perkembangannya, untuk di kawasan Basemen Alun-alun, Atet menjelaskan, sudah mencapai 90 persen. Saat ini, fasilitas dan instalasi penunjang di kawasan tersebut sedang dimaksimalkan.

"Sekarang sedang fokus memasang elektrikal, diberi kipas angin, penerangannya diperbaiki, progressnya sudah 90 persen untuk di Basemen Alun-alun," kata Atet Dedi Handiman, Selasa (14/11).

Sedangkan untuk kawasan Tegalega, ia menyebut seluruh prosesnya sudah berjalan. Sekitar 270 PKL di wilayah

barat dan sekitar 235 PKL di wilayah timur kawasan Tegalega sudah dipindahkan ke area dalam.

Atet juga mengatakan, nantinya para PKL di Tegalega akan ditata sesuai segmen produk yang mereka jual. Secara garis besar, ada dua segmen yaitu segmen kuliner dan non kuliner. "Nanti akan ada tenda komunal. Jadi untuk PKL kuliner, ada tenda yang bisa digunakan pembeli secara bersama-sama," ucapnya.

Sedangkan untuk penataan PKL di kawasan Gelap Nyawang, pihaknya menambahkan saat ini Pemkot Bandung masih menunggu kepastian pihak yang membantu penataan kawasan ini. Adapun penataan PKL di kawasan diprediksi rampung pada 2024.

"Masih perlu dipastikan (pengelola penataan PKL Gelap Nyawang). Kalau sudah fix, nanti kita akan bahas mengenai konsepnya," ujar dia. ● **pra**

Pekerja Kebersihan Terseret Arus Air di Gorong-gorong, Rompinya Ditemukan

BOGOR (IM)- Pencarian pekerja kebersihan berinisial R (49), yang hanyut terseret air ke dalam gorong-gorong di Bogor kembali dilanjutkan. Tim SAR pun sempat menemukan rompi yang diduga milik pria paruh baya itu di aliran Sungai Cibalok, Kota Bogor.

"Tadi ada penemuan rompinya korban diperkirakan ya. Di daerah di belakang Dishub aliran Sungai Cibalok," kata Komandan Regu (Danru) BPBD Kota Bogor, Maruli Sinambela, Selasa (14/11).

Maruli menambahkan, tim SAR gabungan tengah memperluas pencarian. Sedikitnya, terdapat 50 personel yang dilibatkan dalam operasi ini.

"Teman-teman sekarang istirahat dulu untuk mengisi tenaga. Kalau memungkinkan kembali titik pertemuan di hilir sana, jadi (pencarian) diperluas. Tadi ada satu titik di Kuntum dicurigai tapi te-

man-teman sudah melakukan pencarian dimaksimalkan karena ada semacam palung atau celukan," jelasnya.

Adapun kendala yang dihadapi personel dalam pencarian yakni hujan dan kondisi sungai yang banyak penyempitan serta sampah. Rencananya, pencarian terus dilakukan hingga pukul 17.00 WIB.

"Hari ini sampai jam 5 sore kalau cuaca memungkinkan," ujarnya.

Sebelumnya, pekerja kebersihan berinisial R (49), hilang terseret air ke dalam gorong-gorong di Simpang Ciawi, Bogor pada Senin 13 November 2023. R terseret air ketika membersihkan tumpukan sampah yang sempat viral di media sosial tersebut.

Ketika sedang membersihkan, mendadak korban terseret air ke dalam gorong-gorong. Sedangkan dua rekannya berhasil menyelamatkan diri. ● **gio**



STABILISASI PASOKAN DAN HARGA CABAI RAWIT MERAH

Pembeli memilih cabai rawit merah di Pasar Cibirang, Kab. Bogor, Jabar, Selasa (14/11). Pemerintah mengupayakan stabilisasi pasokan dan harga cabai rawit merah yang mengalami peningkatan beberapa waktu terakhir, dengan mendorong mobilisasi pasokan dari daerah surplus ke daerah defisit untuk membangun pemerataan distribusi di seluruh wilayah.

Revisi Raperda RTRW Kabupaten Bogor Ditargetkan Paripurna di Akhir November

BOGOR (IM)- Pansus Revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DPRD Kabupaten Bogor menunggu arahan dari Kementerian ATR/BPN dan siap merevisinya.

"Kami sudah mengirim dokumen draft revisi Perda RTRW sebelumnya nomor 11 Tahun 2016 ke Kementerian ATR/BPN, kalau sudah dikembalikan, kami akan bahas dan merevisinya sesuai arahnya dan mengirimkan dokumen tersebut ke Pemprov Jawa Barat," kata Ketua Pansus Revisi Perda RTRW DPRD Kabupaten Bogor, Andi Permana kepada wartawan, Selasa (14/11).

Andi Permana menerangkan, jikalau Gubernur maupun Pemprov Jawa Barat menyetujui draft dokumen revisi Perda RTRW, maka akan segera dirapat paripurnakan.

"Apabila lancar, target kami revisi Raperda RTRW akan kami paripurnakan, lalu menjadi Perda RTRW yang terbaru. Waktunya paling cepat di akhir Bulan November dan paling lambat di akhir tahun ini,"

terang Andi Permana. Polisi Partai Gerindra ini menjelaskan dari total 143 pasal, jajarannya selain mengakomodir kepentingan pemerintah pusat, Pansus Revisi Perda RTRW pun memasukkan nilai-nilai muatan lokal.

"Ada nilai-nilai muatan lokal yang kami masukkan dalam Revisi Perda RTRW, karena pada Perda nomor 11 Tahun 2016, belum diakomodir seperti kawasan atau zona pertambangan di wilayah Bogor Barat," jelasnya.

Sekda Kabupaten Bogor, Burhanudin menambahkan bahwa dengan adanya Revisi Raperda RTRW bakal ada kawasan industri di Kecamatan Jasinga dan Kecamatan Tenjo dengan luas 1.000 hektare.

"Kawasan industri di wilayah Bogor Barat itu di Kecamatan Jasinga dan Tenjo, selain Kecamatan Rumpin yang sudah 'masuk' dalam kawasan industri di Perda RTRW nomor 11 Tahun 2016," tambah Burhanudin. ● **gio**

8 Nusantara



ANGKUTAN GRATIS BAGI PENONTON PIALA DUNIA U-17

Penonton antre menaiki shuttle bus untuk menyaksikan Piala Dunia U-17 2023 di Gedong Budaya Soreang, Kabupaten Bandung, Jabar, Selasa (14/11). Pemkab Bandung menyediakan layanan 30 bus pengumpan (shuttle bus) gratis selama penyelenggaraan Piala Dunia U-17 yang digelar di Stadion Si Jalak Harupat pada 11-21 November 2023.

Bupati Bogor: Wilayah Sasak Panjang Bisa Jadi Desa Wisata Onderdil Motor

Menurut Bupati Bogor, Iwan Setiawan, di Tajur Halang ada banyak fasilitas umum yang luas dan memiliki nilai ekonomis. Sehingga apabila dikelola dengan baik, bisa berpotensi menghasilkan pendapatan daerah.

TAJUR HALANG (IM)- Jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melakukan blusukan ke Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor, Jawa

Barat, Selasa. Mereka mengecek langsung dan mendengarkan masukan dari masyarakat.

"Hari ini di Tajur Halang ada di beberapa titik, kita me-

lihat langsung ke masyarakat. Yang pertama kita ingin Tajur Halang ini sebagai wisata alam juga," kata Bupati Bogor, Iwan Setiawan di Tajur Halang, Selasa (14/11).

Menurut Iwan, di Tajur Halang ada wilayah yang menjadi pusat onderdil motor, yaitu di daerah Sasak Panjang. Iwan menyebut kawasan Sasak Panjang bisa dijadikan sebagai obyek wisata.

"Dan yang unik di Tajur Halang itu dari dulu terkenal sebagai daerah spare part motor nasional Sasak Panjang,"

tuturnya.

Iwan mengatakan ingin menjadikan wilayah Sasak Panjang menjadi sentra onderdil motor. Dia berharap nantinya Tajur Halang menjadi tempat spare part terbesar di Jabodetabek.

"Ini juga menjadi wisata juga, saya dengan Bu Kades jadinya Tajur Halang menjadi tempat spare part terbesar di Bogor atau Jabodetabek," ungkapnya.

Menurutnya, di Tajur Halang ada banyak fasilitas umum yang luas dan memi-

liki nilai ekonomis. Sehingga apabila dikelola dengan baik, bisa berpotensi menghasilkan pendapatan daerah.

Iwan mengaku juga menerima sejumlah masukan dari masyarakat Tajur Halang. Salah satunya mengenai jalan rusak agar segera diperbaiki.

"Masyarakat inginnya jalan-jalan yang banyak perumahan itu untuk diaspal atau dibeton. Beberapa juga ada jalannya yang sudah diserahkan ke kami boleh dibuat dengan Samisade (satu miliar satu desa) 1,4 Km," jelasnya. ● **gio**

Pemkab dan DPRD Kab. Bandung Tetapkan APBD 2024 Rp5,9 Triliun

K A B U P A T E N BANDUNG (IM)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung bersama DPRD Kabupaten Bandung mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5,9 triliun.

Bupati Bandung, Dadang Supriatna mengatakan APBD 2024 tersebut belum termasuk belanja-belanja spesifik grant yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp2,7 triliun. Jika ditambah belanja-belanja tersebut, total APBD Kabupaten Bandung menjadi sebesar Rp7,2 triliun.

"Alhamdulillah kami bersama DPRD telah menyepakati bahwa APBD 2024 sebesar Rp7,2 triliun. Terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD Kabupaten Bandung," kata Dadang di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (14/11).

Ia mengaku bersyukur karena APBD Kabupaten Bandung 2024 ini mening-

kat signifikan sebesar Rp2,5 triliun dibanding APBD murni Kabupaten Bandung 2023 yang sebesar Rp 4,7 triliun. "Ada penambahan APBD yang signifikan karena kami ada peningkatan PAD (pendapatan asli daerah)," kata dia.

Dadang mengatakan prioritas pembangunan APBD Kabupaten Bandung 2024 telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Dia menyebut terdapat enam prioritas pembangunan Kabupaten Bandung yang telah ditetapkan berdasarkan hasil konsultasi publik dan pertimbangan evaluasi pembangunan antara lain pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, lingkungan hidup, dan reformasi birokrasi.

Dadang mengatakan peningkatan infrastruktur dan konektivitas akan menjadi fokus dalam pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi.

"Jika kita fokus menggarap pariwisata apalagi jika terintegrasi, sektor ini akan mampu menyumbang PAD yang signifikan bagi Kabupaten Bandung. Nantinya akan mampu menopang pembangunan yang lain," katanya.

Selain itu, dalam bidang kesehatan Pemkab Bandung memprioritaskan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan masyarakat yang sehat dan produktif.

"Kami memiliki prioritas untuk dapat menyelesaikan beberapa rumah sakit tipe C yang sedang kami bangun karena ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nanti kita akan punya lima RSUD baru yang dapat melayani masyarakat," katanya. ● **pra**



NILAI PRODUKSI TEH NASIONAL

Pekerja memetik daun teh di Warungkondang, Kabupaten Cianjur, Jabar, Selasa (14/11). Bank Indonesia perwakilan Jabar menyebutkan Indonesia merupakan negara produsen teh terbesar kedelapan di dunia atau kedua di Asia Tenggara dengan nilai produksi mencapai 148 ribu ton per tahun dan sekitar 70 persen pasokan teh itu berasal dari Jabar.

Bupati Cirebon Diminta Evaluasi Kinerja Pejabat Dinkes

CIREBON (IM)- Bupati Cirebon, Imron diminta untuk segera melakukan evaluasi kinerja pejabat di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cirebon.

Hal itu karena pola komunikasi yang dibentuk Dinkes Kabupaten Cirebon selalu terputus dan sulit untuk bisa menembus komunikasi dengan Kadinkes Kabupaten Cirebon, Neneng Hasanah.

"Mendekati dua tahun Neneng menjadi Kadinkes itu, kinerjanya sangat buruk. Ini berdasarkan hasil analisa kami. Karena pola komunikasi yang tidak pernah nyambung dan cenderung menutup diri," kata Sekjen Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Cirebon, Wahyu Suwandi, Selasa (14/11).

Menurutnya, meskipun memang banyak program namun pola komunikasi tertutup membuat banyak lembaga mengaku sulit untuk melakukan komunikasi. Hal itu diperparah dengan sikap Sekdis Dinkes, Edi Susanto. Wahyu menilai, sikap Edi seolah melakukan pembiaran dengan situasi saat ini.

"Jadi bupati harus melakukan evaluasi kinerja Kadinkes dan Sekdisnya. Tidak adil kalau bupati hanya mengevaluasi kinerja Kadinkes saja. Kadis dan Sekdis Dinkes kinerjanya sama-sama buruk," ungkap Wahyu.

Wahyu menilai, justru dengan buruknya kinerja Kadis dan Sekdis Dinkes, dirinya curiga capaian kinerja Dinkes Kabupaten Cirebon, tidak maksimal. Artinya, visi misi Bupati Cirebon di Dinkes Kabupaten Cirebon, tidak akan tercapai.

"Ini bukan berdasarkan asumsi. Ini hasil investigasi kami selama ini. Toh hampir semua kawan-kawan lembaga mengeluhkan kinerja Dinkes Kabupaten Cirebon. Harusnya bupati segera melakukan evaluasi,"

ucapnya.

Hal senada dikatakan Sekretaris DPC Repdem Kabupaten Cirebon, Warcono. Buruknya kinerja Dinkes Kabupaten Cirebon, terlihat dari tidak transparannya proyek-proyek yang ada di Dinkes tersebut. Dia menduga, ada monopoli pembagian pekerjaan yang mungkin dikelola oleh Kadis maupun Sekdis.

"Kegiatan-kegiatan di Dinkes Kabupaten Cirebon itu, tidak transparan. Pembagian proyek diduga diatur dan dimonopoli. Entah itu oleh Kadinkes atau Sekdisnya, ini yang sedang kami investigasi," jelas Warcono.

Dirinya mencontohkan, banyak kegiatan proyek di Dinkes, namun hanya beberapa kegiatan saja yang tayang di LPSE. Ini membuktikan, Dinkes tidak transparan dan terkesan menutupi. Sementara ketika lembaga menanyakan masalah tersebut, Kadinkes memilih menghindari sementara Sekdisnya beralasan, bukan urusan dirinya.

"Kalau bupati meleak, harusnya rotasi mutasi tahun ini, dua pejabat teras ini harusnya digeser. Jangan diberikan jabatan strategis, karena malah merusak kinerja Bupati dalam pencapaian visi misi," ujar Warcono.

Sementara itu, ketika dikonfirmasi kepada Bupati Cirebon, Imron, dirinya mengaku belum mendapatkan laporan terkait kinerja Dinkes Kabupaten Cirebon. Menurutnya, selama ini kinerja Dinkes masih berjalan lancar.

"Terkait pola komunikasi dengan lembaga lain yang dinilai kurang baik, saya belum tahu ya. Kalau ini terjadi, ya harus segera diperbaiki. Kita lihat saja, apakah kedepan persoalan ini semakin mengemuka atau tidak," tukas Imron. ● **pra**